

Faktor Penghambat Integrasi Budaya Arab-Melayu di Palembang: Endogami dalam Perspektif Historis dan Sosial-Budaya

Factors Hindering Arab-Malay Cultural Integration in Palembang: Endogamy from Historical and Socio-Cultural Perspectives

Apriana¹

Universitas Muhammadiyah Palembang

nisrina.dani@gmail.com

Heryati²

Universitas Muhammadiyah Palembang

heryatitoya15@gmail.com

Fatmah³

Universitas Muhammadiyah Palembang

fatrianafatmah@gmail.com

Dewi Purnama Sari⁴

Universitas Muhammadiyah Palembang

dewi_purnama_sari@um-palembang.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik endogami memengaruhi proses integrasi budaya Arab–Melayu di Palembang serta menjelaskan faktor-faktor historis yang memperkuat keberlangsungan praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi pustaka yang didukung oleh sumber lisan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik endogami pada masyarakat Arab, khususnya golongan Sayid, pada dasarnya merupakan tradisi yang telah dibawa dari Hadramaut sebagai upaya menjaga kesinambungan nasab (ahl al-bayt). Namun, dalam konteks Palembang, praktik tersebut mengalami penguatan melalui dinamika sejarah. Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, kedudukan sosial-politik masyarakat Arab yang relatif tinggi mendorong terbentuknya pola pernikahan dengan kalangan elite. Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda, kebijakan penggolongan penduduk dan segregasi permukiman semakin memperkuat eksklusivitas komunitas Arab. Kondisi tersebut menyebabkan praktik perkawinan endogami tetap bertahan sebagai norma sosial yang membatasi integrasi melalui institusi pernikahan. Meskipun proses akulturasi budaya Arab–Melayu berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, bahasa, ekonomi, dan tradisi, integrasi melalui hubungan kekerabatan berkembang secara lebih terbatas. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan integrasi budaya Arab–Melayu tidak semata-mata disebabkan oleh praktik endogami, melainkan oleh proses historis yang memperkuat dan mempertahankan praktik tersebut sebagai bagian dari identitas sosial komunitas Arab di Palembang.

Kata Kunci: Integrasi Budaya; Arab-Melayu Palembang; endogami; Sosial-Budaya.

ABSTRACT: This study aims to analyze how endogamous marriage has influenced the process of Arab–Malay cultural integration in Palembang and to explain the historical factors that reinforced the persistence of this practice. The research employs the historical method, consisting of heuristics (data collection through archival research and interviews), source criticism, interpretation, and historiography. The findings reveal that endogamy among the Arab community, particularly the Sayyid (Ba'Alawi) group, was not a tradition that originated in Palembang but had been inherited

from Hadramaut as a means of preserving genealogical continuity (ahl al-bayt). Within the Palembang context, however, this practice was reinforced by historical developments. During the Palembang Sultanate, the relatively privileged socio-political position of the Arab community encouraged marital alliances with the local aristocracy. Subsequently, under Dutch colonial rule, legal classification of the population and residential segregation further strengthened the exclusivity of the Arab community. These historical processes contributed to the institutionalization of endogamy as a social norm that limited cultural integration through intermarriage. Although Arab–Malay cultural interaction developed in various aspects of public life, including religion, language, commerce, architecture, and religious traditions, integration through kinship relations remained relatively limited. This study argues that the limited cultural integration between Arabs and Malays in Palembang should not be understood solely as a consequence of endogamous marriage itself, but rather as the outcome of historical processes that reinforced and sustained endogamy as an important component of Arab communal identity.

Keywords: Cultural Integration; Arab-Malay Palembang; Endogamy; Socio-Cultural.

A. PENDAHULUAN

Hubungan Palembang dengan Timur Tengah sudah terjalin jauh sebelum kedatangan Islam dan terus berlanjut pasca kedatangan Islam bahkan pada puncaknya terbentuknya kerajaan Islam atau yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Palembang Darussalam.¹ Adapun mengenai kedatangan koloni Arab dari Hadramaut ke Indonesia termasuk Palembang diperkirakan terjadi sejak pertengahan abad ke-13,² dan kebanyakan dari mereka semuanya pria.³ Kelompok etnis ini pada awalnya merupakan pedagang sekaligus berdakwah tetapi seiring dengan perjalanan waktu lama kelamaan mereka menetap dan menikah dengan penduduk setempat.⁴

Alur historis yang terjadi dalam perjalanan Islam di Nusantara dalam hubungannya dengan perkembangan Islam di Timur Tengah. Dapat dilacak sejak awal-awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara sampai kurun waktu yang demikian panjang dimulai sejak terjadi interaksi kaum Muslim Timur Tengah dengan Nusantara. Menurut Azra,⁵ pada awalnya hubungan itu lebih berbentuk hubungan ekonomi dan dagang, kemudian disusul hubungan politik-keagamaan, dan untuk selanjutnya diikuti dengan hubungan intelektual keagamaan.⁶

¹ Sultan Gholand Astapala, "Historiografi Masuknya Islam Di Palembang Dan Pesat Kesultanan Palembang Pada Masa Itu . Ada Sebelumnya , Terasa Kurang Meyakinkan Jika Hanya Mengacu Pada Abad Ke-13 Dan Ke-16 Kejayaan Kerajaan Sriwijaya Yang Berpusat Di Palembang , Di Mana Para Pedagang," *Indo-Mathedu Intellectuals Journal* 6, No. 5 (2025): 7824–34, <https://doi.org/10.54373/Imej.V6i5.3776>.

² Hadramaut merupakan wilayah historis di pesisir selatan Jazirah Arab (kini termasuk Republik Yaman) yang sejak abad pertengahan menjadi pusat migrasi masyarakat Arab-Hadrami. Dari kawasan inilah banyak pedagang dan ulama melakukan diaspora ke berbagai wilayah Samudra Hindia, termasuk Indonesia.

³ Maryamah Et Al., "Kampung Arab Al-Munawar Sebagai Salah Satu Destinasi Sejarah Melayu Di Palembang," *Kalpataru* 10, No. 1 (2024): 30–36.

⁴ Apriana Apriana, "Asimilasi Kultural Arab-Melayu Palembang," *Medina-Te : Jurnal Studi Islam* 15, No. 2 (2020): 199–214, <https://doi.org/10.19109/Medinate.V15i2.4248>.

⁵ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994),

⁶ Sulaiman Kurdi, "Transnasional Islamic Movement (Studi Gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia)," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 1, No. 2 (2013): 227–44.

Proses akulturasi dan penyesuaian sosial-budaya ini tampak nyata dalam adopsi bahasa Melayu sebagai *lingua franca*, keterikatan dalam tradisi keagamaan Islam, konvergensi gaya arsitektur pemukiman, hingga jaringan kemitraan ekonomi dan keterlibatan dalam ritual sosial-keagamaan Bersama.⁷ Namun demikian, keterbukaan integrasi budaya di ruang publik tersebut berhadapan dengan garis batas yang ditarik secara tegas pada ranah privat, khususnya dalam institusi pernikahan.

Di balik keharmonisan interaksi sosial-ekonomi harian, terdapat prinsip-prinsip mendasar yang dipertahankan secara ketat, terutama yang berkaitan dengan pemeliharaan garis keturunan (*nasab*), perlindungan status genealogis kelompok Sayyid dan Syarifah, serta pelembagaan doktrin kesepadanan (*kafa'ah*). Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui sistem perkawinan endogami, yaitu kecenderungan menikah dengan pasangan yang berasal dari kelompok etnis atau garis keturunan yang sama.⁸ Polemik endogami ini memunculkan ketegangan internal sekaligus menjadi faktor penghambat utama yang membatasi keterjangkauan integrasi budaya, di mana praktik perkawinan endogami membendung terjadinya asimilasi biologis dan pembentukan ikatan kekerabatan campuran dengan masyarakat lokal.

Kajian akademis mengenai keberadaan masyarakat keturunan Arab di Indonesia, khususnya di Palembang, sejauh ini telah menghasilkan corak literatur yang beragam. Penelitian-penelitian terdahulu banyak berfokus pada dinamika spasial Perkampungan Arab Al-Munawar melalui pendekatan arkeologi dan tata ruang⁹ pola adaptasi dan akulturasi budaya publik¹⁰ kontinuitas arsitektur lokal-eklektik,¹¹ hingga historiografi relasi sosial Arab-Melayu dan sejarah perkembangan komunitas.¹² Kendati demikian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut menunjukkan adanya celah akademis (*research gap*) yang belum terisi. Sebagian besar studi masih menempatkan indikator pembauran di ruang publik sebagai tolok ukur integrasi yang menyeluruh, atau sebaliknya, memperlakukan endogami secara terisolasi sekadar sebagai kajian norma hukum Islam dan tradisi internal tanpa mendialektikannya dengan fenomena pembauran

⁷ W R Roff, "The Origins of Malay Nationalism" (Yale University Press, 1967).

⁸ Mochammad Sayyid Abdulloh, Abbas Arfan, Fadil SJ, dan Ramlan, "Pernikahan Endogami Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.29300/mua.v4i2.10168>

⁹ R A Nur Ali and dkk, "Permukiman Al-Munawar 13 Ulu Palembang: Kajian Arkeologi Ruang Pemukiman Etnis Arab," *Siddhayatra: Jurnal Arkeologi* 24, no. 1 (2019): 15–30.

¹⁰ Jumhari, "Akulturasi Budaya Arab, Cina, Dan Lokal Di Palembang," *Jurnal Siddhayatra* 23, no. 2 (2018): 110–125.

¹¹ A Mawardi and dkk, "Arsitektur Eklektik Rumah Komunitas Arab Di Kampung Al-Munawar Palembang," *Jurnal Langkau Betang* 7, no. 2 (2020): 89–102.

¹² H Algadri, "Islam Dan Keturunan Arab Di Indonesia. Mizan," 1999.

sosial. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik membedah praktik perkawinan endogami sebagai variabel utama sekaligus faktor penghambat dalam konteks integrasi budaya Arab-Melayu. Kebaharuan ilmiah (*scientific novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan endogami sebagai lensa analitis untuk mengurai bagaimana pertahanan identitas genealogis beroperasi membatasi integrasi budaya di tengah tingginya pembauran sosial-ekonomi masyarakat.

Palembang yang merupakan ibu kota Kerajaan Sriwijaya tercatat sebagai tempat bertemunya beberapa peradaban besar dunia dalam perspektif sejarah berdirinya sebuah kota dalam pengertian sosial politik, ekonomi maupun budaya.¹³ Sriwijaya pada zamannya merupakan pusat perdagangan dan pelayaran Internasional. Palembang menjadi bandar terpenting bagi perdagangan dan pelayaran Indonesia bagian barat yang menghubungkan dua kawasan penting Asia, yakni Cina, India, dan Arab. Bahkan, Palembang merupakan salah satu daerah terpenting bagi terbentuknya komunitas yang berciri kosmopolitan, yakni pada periode kerajaan maritim Sriwijaya dan pada masa Kesultanan Islam Palembang Darussalam. Sejak abad VII M, menurut data sejarah menyebutkan bahwa kelompok etnis Arab sudah ada di Palembang. Dalam sumber Arab disebutkan bahwa kelompok etnis ini singgah di Palembang sebelum melanjutkan perjalanannya ke Cina. Artinya, Palembang merupakan kota transit bagi etnis Arab sebelum melanjutkan perjalanannya ke wilayah Cina.¹⁴

Keberadaan komunitas Muslim di wilayah Kerajaan Sriwijaya mengindikasikan bahwa proses Islamisasi telah mulai berlangsung sejak periode tersebut, meskipun masih terbatas pada komunitas pedagang asing dan sebagian kecil penduduk setempat. Namun demikian, selama kurang lebih lima abad setelah kontak awal itu, Islam masih belum berkembang secara luas di Palembang. Kuatnya dominasi politik Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha menyebabkan penyebaran Islam masih berlangsung secara terbatas dan belum mampu membentuk komunitas Muslim yang besar. Hal senada dikatakan oleh Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto¹⁵

¹³ Apriana, "Asimilasi Kultural Arab-Melayu Palembang."

¹⁴ Kabib Sholeh, "Nilai-Nilai Sejarah Dan Budaya Kampung Arab Al-Munawar Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kota Palembang Historical And Cultural Values Of Al-Munawar Arab Village As A Cultural Heritage Area Of Palembang City," *In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Ips*, Vol. 1 (Palembang, 2022), 23–24.

¹⁵ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, eds., *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

yang berpendapat bahwa kedatangan para pedagang Muslim dari Arab, Persia (Iran), dan wilayah Timur Tengah lainnya ke Palembang belum dapat dijadikan bukti bahwa Islamisasi telah berlangsung secara besar-besaran, mengingat Kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha pada masa itu masih memiliki kekuasaan politik yang kuat sehingga pengaruh Islam terhadap masyarakat lokal masih relatif terbatas.

Baru sejak kerajaan tersebut mengalami kelemahan bahkan runtuh pada sekitar abad ke-14 M, Islamisasi perlahan mulai muncul sehingga pada akhir abad ke-15 M muncul komunitas muslim di Palembang. Namun, sampai abad ke-16 M, proses Islamisasi di Palembang masih belum menonjol, meskipun wilayah tersebut telah berada di bawah pengaruh kekuasaan Islam Jawa. Proses Islamisasi baru berkembang secara lebih intensif pada akhir abad ke-17 M seiring berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam sebagai kerajaan Islam yang independen.

Pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, orang-orang Arab diberikan perlakuan istimewa karena mereka dianggap lebih mumpuni dalam masalah agama. Van den Berg¹⁶ menegaskan bahwa diberikannya perlakuan istimewa oleh masyarakat Nusantara pada orang-orang Arab karena acap kali mereka diyakini sebagai keturunan dan pewaris Nabi. Hal tersebut dapat dilihat secara seksama dari peninggalan arkeologi yang berupa makam, baik itu makam para Sultan Palembang Darussalam maupun makam para bangsawan Kesultanan yang selalu didampingi oleh makam ulama yang merupakan guru agama Sultan dan kerabat-kerabat Kesultanan. Kedudukan strategis tersebut pada dasarnya menciptakan peluang yang besar bagi terjadinya akulturasi budaya antara komunitas Arab dan masyarakat Melayu Palembang, meskipun dalam praktiknya integrasi tersebut tidak berlangsung secara menyeluruh, terutama dalam ranah perkawinan.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti di perkampungan-perkampungan Arab di Palembang terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan kecenderungan terjadinya integrasi budaya orang Arab dengan Melayu dan sebaliknya. *Pertama*, adanya kesamaan dalam hal keyakinan. Pada umumnya orang-orang Arab beragama Islam maka mereka akan lebih mudah berbaur dengan masyarakat lokal Palembang yang beragama

¹⁶ L.W.C. van den Berg, *Orang Arab di Nusantara*, trans. Rahayu Hidayat (Depok: Komunitas Bambu, 2010), 96 ; Van den Berg menjelaskan bahwa golongan Sayyid (*Alawiyyin*) memperoleh kedudukan yang sangat terhormat di tengah masyarakat Muslim karena mereka diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Status genealogis tersebut memberi mereka otoritas moral dan religius sehingga sering dihormati sebagai pemimpin agama dan pendakwah.

Islam. *Kedua*, adanya kesamaan dalam bahasa komunikasi. Untuk komunikasi sehari-hari, keturunan Arab di Palembang semuanya menggunakan bahasa Melayu (Palembang) dengan fasih. *Ketiga*, adanya kesamaan ciri-ciri fisik. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan antar etnis Arab dan Melayu terjadi sejak lama. Walaupun dalam kenyataannya laki-laki Arab boleh menikah dengan wanita Melayu tetapi sebaliknya wanita Arab tidak boleh menikah dengan orang Melayu karena menggunakan prinsip *kafa'ah* dengan menganut sistem patrilineal. *Keempat*, adanya ritual/seremonial orang Arab dan Melayu yang merupakan bagian dari ritual masyarakat Arab-Melayu Palembang secara umum. *Kelima*, dari segi bangunan rumah orang Arab mengambil bentuk rumah adat Palembang, Rumah Limas dan Panggung. *Keenam*, adanya kesamaan dalam jenis pekerjaan orang Arab dan Melayu di Palembang.

Bila dipahami dari uraian di atas, terlihat dengan jelas beberapa faktor-faktor pendukung integrasi budaya Arab-Melayu di Palembang. Akan tetapi bila dicermati terdapat pula faktor penghambat integrasi budaya Arab-Melayu Palembang yang mengakibatkan terhambatnya proses integrasi budaya antar kedua kebudayaan tersebut. Di antara faktor tersebut dapat disoroti dari sisi historis-politis dan sosial-budaya. Di sinilah letak paradoks kebudayaan yang sangat menarik untuk dibedah. Komunitas keturunan Arab telah mencapai derajat akulturasi yang tinggi di berbagai sektor kehidupan; mendiami ruang arsitektur yang serasi dengan lingkungan sekitar, melebur dalam bahasa dan dialek lokal, menjadi pilar dalam jaringan ekonomi daerah, serta melaksanakan berbagai ritual keagamaan yang sama dengan mayoritas masyarakat. Secara kasat mata, batas-batas perbedaan etnis tampak telah kabur. Namun, ketika memasuki ranah perkawinan dan kekerabatan, batas-batas identitas kembali ditegaskan melalui praktik endogami. Di satu sisi, komunitas Arab mengakomodasi berbagai unsur budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di sisi lain tetap membatasi asimilasi biologis melalui penolakan terhadap perkawinan eksogami. Fenomena ini menunjukkan bahwa integrasi budaya berlangsung secara selektif, sementara ranah kekerabatan tetap dipertahankan sebagai instrumen utama pelestarian identitas etnis.

Kajian mengenai integrasi masyarakat Arab–Melayu di Palembang telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada proses integrasi budaya, sejarah permukiman, serta dinamika interaksi sosial masyarakat Arab dengan masyarakat Melayu, sedangkan kajian mengenai faktor-faktor

yang menghambat integrasi budaya masih relatif terbatas. Penelitian dari Maryamah, dkk¹⁷ mengkaji perkembangan Kampung Arab Al-Munawar 13 Ulu Palembang melalui pendekatan arkeologis dengan menelaah komponen-komponen permukiman, pola tata ruang, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan kawasan tersebut. Sementara itu, penelitian dari Mochammad Sayyid Abdulloh, dkk¹⁸ lebih banyak membahas praktik endogami dalam perspektif pelestarian nasab, doktrin *kafa'ah*, maupun hukum keluarga Islam.

Penelusuran terhadap berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik endogami umumnya dipahami sebagai tradisi perkawinan internal yang berdiri sendiri, belum dianalisis sebagai faktor yang membatasi proses integrasi budaya Arab–Melayu. Di sisi lain, kajian mengenai permukiman dan budaya publik juga belum mengaitkan sistem kekerabatan privat dengan terbatasnya pembauran budaya. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana endogami sebagai kacamata utama untuk membongkar batas-batas integrasi. Dengan menempatkan endogami pada pusat analisis, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembauran di ranah bahasa, agama, politik, dan tradisi lokal pada kenyataannya tidak serta-merta meluruhkan benteng eksklusivisme kekerabatan di ruang privat.

Penelusuran terhadap penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam kajian mengenai integrasi budaya Arab–Melayu di Palembang. Praktik endogami umumnya dipahami sebagai tradisi perkawinan internal yang berkaitan dengan pelestarian nasab, doktrin *kafa'ah*, atau hukum keluarga Islam, tetapi belum dianalisis sebagai mekanisme sosial yang membatasi proses integrasi budaya. Sebaliknya, kajian mengenai permukiman dan budaya publik lebih banyak menyoroti bentuk-bentuk pembauran budaya tanpa mengaitkannya dengan sistem kekerabatan sebagai ruang reproduksi identitas kelompok. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menempatkan praktik endogami sebagai fokus analisis untuk menjelaskan batas-batas integrasi budaya Arab–Melayu di Palembang. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses integrasi budaya berlangsung secara diferensial. Pembauran pada ranah

¹⁷ Maryamah, Nurhusna, Azzahrah Ramaputri Tilotama, dan Melisa Putri Utami. "Kampung Arab Al-Munawar sebagai Salah Satu Destinasi Sejarah Melayu di Palembang." *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 10, no. 1 (2024): 30–36.

¹⁸ Mochammad Sayyid Abdulloh, Abbas Arfan, Fadil SJ, dan Ramlan, "Pernikahan Endogami Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.29300/mua.v4i2.10168>

publik berkembang secara luas, sedangkan ranah perkawinan tetap diatur oleh norma endogami yang berfungsi mempertahankan kesinambungan identitas genealogis. Dengan demikian, integrasi budaya tidak berlangsung secara menyeluruh, melainkan terbatas pada bidang-bidang tertentu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*)¹⁹, dengan pendekatan interdisipliner, yaitu memadukan pendekatan sejarah, sosiologi, antropologi budaya, dan politik. Metode sejarah²⁰ digunakan untuk merekonstruksi perkembangan praktik endogami masyarakat keturunan Arab di Palembang dari masa Kesultanan Palembang Darussalam, periode kolonial Belanda, hingga masa kontemporer. Sementara itu, pendekatan interdisipliner digunakan untuk menjelaskan praktik endogami tidak hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai fenomena sosial-budaya yang memengaruhi proses integrasi budaya Arab–Melayu.

Pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri proses terbentuknya komunitas Arab, perubahan kedudukan sosial masyarakat Arab, kebijakan kolonial terhadap pengelompokan etnis, serta dinamika hubungan masyarakat Arab dengan masyarakat Melayu dari waktu ke waktu. Pendekatan sosiologi digunakan untuk menganalisis bagaimana norma, nilai, sistem kekerabatan, dan tindakan sosial mempertahankan praktik endogami sebagai mekanisme reproduksi identitas kelompok. Dalam analisis ini digunakan perspektif Talcott Parsons²¹ mengenai tindakan sosial untuk menjelaskan bagaimana aktor bertindak dalam kerangka nilai, norma, dan struktur sosial yang membatasi pilihan perkawinan. Selain itu digunakan pemikiran Lamanna dan Riedmann²² mengenai faktor-faktor sosial yang memengaruhi pilihan pasangan hidup dalam masyarakat.

Pendekatan antropologi budaya digunakan untuk menjelaskan endogami sebagai bagian dari adat dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Perspektif Bronislaw

¹⁹ Rustamana, "Metode Historis Sebagai Pedoman Dalam Penelitian Sejarah," *Cendekia Pendidikan* 4, No. 4 (2024): 50–54, <https://doi.org/10.9644/Sindoro.V4i5.3317>.

²⁰ Louis Gottschalk. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. 2nd ed. New York: Alfred A. Knopf, 1969; Metode sejarah adalah suatu proses untuk menilai dan menganalisis sumber-sumber historis guna memperoleh informasi yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengolahnya menjadi narasi sejarah yang kredibel.

²¹ Talcott Parsons. *The Social System*. New York: The Free Press, 1951.

²² Mary Ann Lamanna dan Agnes Riedmann, *Marriages & Families: Making Choices in a Diverse Society*, 10th ed. (Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009).

Malinowski²³ digunakan untuk memahami adat sebagai sistem budaya yang mengatur perilaku anggota masyarakat melalui norma dan sanksi sosial sehingga praktik endogami tetap dipertahankan sebagai mekanisme pelestarian identitas genealogis.

Selanjutnya, pendekatan politik digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan kolonial Belanda mengenai stratifikasi sosial dan pemisahan permukiman berdasarkan etnis berkontribusi terhadap terbentuknya eksklusivisme sosial masyarakat keturunan Arab yang kemudian memperkuat praktik endogami hingga masa setelah kolonial. Fakta-fakta dari pendekatan tersebut kemudian diinterpretasikan secara analitis dan sintetis agar dapat ditemukan hubungan antara satu fakta dengan fakta lainnya, sesuai dengan tema yang dikaji. Pada tahap selanjutnya, fakta-fakta yang telah terkumpul dan saling terkait tersebut disusun secara kronologis untuk mendapatkan narasi sejarah (historiografi).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Historis-Politis dan Institusionalisasi Endogami sebagai Penghambat Integrasi

Pada masa Kesultanan, dari segi politis, orang Arab mampu menarik hati sultan dengan ke dalam agama dan kehandalan dagangnya, sehingga orang Arab pada fase awal kedatangannya dapat dengan mudah menikahi para wanita bangsawan sehingga dapat mempermudah proses integrasi budaya. Orang Arab yang umumnya datang dari Hadramaut mempunyai kedudukan kelas khusus. Keistimewaan kedudukan masyarakat Arab di Kesultanan Palembang dapat dilihat dari kesaksian pengunjung Belanda yang pernah mendatangi keraton. Ia mencatat bahwa para pembesar kerajaan harus melakukan sembah hingga menyentuh lantai ketika menghadap sultan, sedangkan orang-orang Arab diperbolehkan duduk di kursi di samping sultan.²⁴ Perbedaan perlakuan tersebut menunjukkan posisi sosial masyarakat Arab yang lebih istimewa dibanding kelompok lainnya.

Di samping itu, masyarakat Arab di Palembang hampir semata-mata terdiri dari anggota Ba'Alawi yang menelusuri keturunan mereka hingga Nabi Muhammad

²³ Malinowski, Bronislaw. *Crime and Custom in Savage Society*. London: Routledge & Kegan Paul, 1926.

²⁴ Marbun, Firdaus. "Ziarah Kubra di Palembang: Antara Kesadaran Religi dan Potensi Ekonomi." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 3, no. 1 (2019): 636–652. <https://doi.org/10.36424/jpsb.v3i1.114>; Keistimewaan posisi masyarakat Arab di lingkungan Kesultanan Palembang juga dikemukakan oleh J. L. van Sevenhoven dan kemudian dikonfirmasi oleh Jeroen Peeters.

melalui cucunya, Husain. Sehingga karena keturunan mulia ini, orang Arab lain di Nusantara, yang tidak termasuk kedudukan sosial mereka, oleh para Alawiyin dipandang rendah. Status yang disahkan agama ini sangat menambah martabat sosial mereka di Palembang; para Sayid sebagai keturunan Nabi Muhammad di mata masyarakat Melayu Palembang dianggap sebagai orang keramat. Menurut para Sultan Melayu, orang-orang Arab juga memiliki silsilah yang justru lebih prestisius karena menyambung kepada Nabi. Sistem kekerabatan inilah yang memungkinkan para Sayid Hadramaut untuk mendekati para penguasa dan memberikan mereka “hadiah berharga dalam bentuk silsilah” yang dapat diperoleh melalui proses perkawinan.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa secara politis masyarakat Arab memperoleh kedudukan yang istimewa di lingkungan Kesultanan Palembang Darussalam. Keistimewaan tersebut tidak hanya didasarkan pada peran mereka dalam aktivitas perdagangan dan penyebaran Islam, tetapi juga pada status genealogis sebagai keturunan Nabi Muhammad yang memberikan legitimasi religius sekaligus *prestise* sosial. Posisi yang terbentuk melalui proses historis ini kemudian memperkuat hubungan antara keluarga-keluarga Arab, khususnya golongan Sayid, dengan kalangan bangsawan Melayu melalui ikatan perkawinan. Praktik perkawinan yang cenderung terbatas pada sesama kelompok elite tersebut pada akhirnya memperkuat sistem perkawinan endogami, sehingga interaksi dan pembauran melalui perkawinan dengan masyarakat di luar kelompok menjadi relatif terbatas. Kondisi inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor yang menghambat proses integrasi budaya Arab–Melayu di Palembang.

Setelah runtuhnya Kesultanan Palembang Darussalam, orientasi perkawinan di kalangan generasi kedua dan ketiga keluarga Sayid mengalami perubahan. Jika sebelumnya hubungan perkawinan dengan keluarga bangsawan Melayu menjadi sarana membangun aliansi politik dan sosial, maka setelah perubahan struktur kekuasaan tersebut, perkawinan dengan kalangan priyayi Palembang tidak lagi dipandang sebagai pilihan yang strategis. Pergeseran status sosial antara kelompok Sayid dan Priyayi menyebabkan keluarga Alawiyin semakin mengarahkan pilihan pasangan kepada sesama kelompoknya, bahkan menjalin hubungan perkawinan dengan komunitas Sayid di Singapura yang dikenal memiliki kedudukan ekonomi

²⁵ Peeters, Jeroen. *Kaum Tuo–Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821–1942*. Jakarta: INIS, 1997.

yang kuat. Adapun perkawinan dengan perempuan dari kalangan priyayi Palembang umumnya hanya terjadi pada keluarga Sayid yang kurang terkemuka, bahkan sering kali menempatkan perempuan tersebut sebagai istri kedua atau ketiga.²⁶ Pola perkawinan tersebut menunjukkan bahwa endogami tidak hanya berfungsi mempertahankan kemurnian nasab, tetapi juga menjadi strategi sosial untuk menjaga kesinambungan status, jaringan kekerabatan, dan kepemilikan ekonomi di dalam kelompok Alawiyin. Argumen ini sejalan dengan kajian mengenai endogami yang menunjukkan bahwa pemilihan pasangan dalam kelompok yang sama sering kali berkaitan dengan upaya mempertahankan status sosial, sumber daya, dan identitas kelompok.²⁷

Selanjutnya hal itu mengindikasikan bahwa telah terjadi pergeseran status sosial antara Sayid dengan Priyayi pasca keruntuhan Kesultanan, bahwa kalangan Alawiyin menganggap status sosial mereka lebih tinggi dibandingkan dengan priyayi, sehingga menyebabkan terjadi pula pergeseran pada pemilihan calon istri yang mengarah ke lingkungan sendiri. Hal tersebut juga merupakan faktor yang menjadi penghambat terjadi integrasi budaya antara orang Arab dengan penduduk setempat (Melayu).²⁸

Pada masa kolonial Belanda terjadi perubahan sosial-politik yang cukup dramatis. Algadri²⁹ menjelaskan pada masa Kolonial, Pemerintah Kolonial Belanda membagi 3 strata masyarakat di Nusantara. Kelas paling atas adalah warga Eropa (Eropa, Amerika, Jepang dan lain-lain), kelas dua warga Timur Asing (Arab, India, Tionghoa dan lain-lain) dan kelas tiga adalah pribumi Indonesia. Ini merupakan kebijakan Belanda yang tercantum dalam *Regeringsreglements*³⁰ tentang pelapisan sosial. *Regelingsreglements* menghasilkan *Exorbitante Rechten* yaitu hak bagi gubernur untuk menentukan tempat tinggal bagi golongan-golongan penduduk Hindia Belanda atau pribadi tertentu. Hak tersebut dikatakan *exorbitante*, artinya khusus-istimewa karena menurut konsep hukum barat memang luar biasa dan tidak lazim.

²⁶ Peeters, Jeroen. *Kaum Tuo–Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821–1942*. Jakarta: INIS, 1997.

²⁷ Mochammad Sayyid Abdulloh, Abbas Arfan, Fadil SJ, dan Ramlan, "Pernikahan Endogami Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural," *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.29300/mua.v4i2.10168>

²⁸ Sunata and C Murod, "Adaptasi Sosio-Kultural Komunitas Arab Di Kota Palembang," *Jurnal Sejarah Dan Budaya* 15, no. 1 (2021): 45–58.

²⁹ Algadri, Hamid. *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.

³⁰ Regeringsreglement (RR) merupakan Undang-Undang Dasar Pemerintahan Hindia Belanda yang ditetapkan pada tahun 1854 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1855 (Staatsblad 1855 No. 2). Regulasi ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan kolonial di Hindia Belanda, termasuk mengatur sistem administrasi, peradilan, serta penggolongan penduduk. Ketentuan mengenai klasifikasi penduduk kemudian dimuat dalam Pasal 109 RR dan selanjutnya disempurnakan dalam *Indische Staatsregeling* (IS) 1925 melalui Pasal 163.

Penggolongan itu dimaksudkan karena penduduk Hindia Belanda sangat heterogen, artinya terdiri dari berbagai suku dan antar golongan etnis, sehingga untuk menghindari konflik antar ras mereka perlu ditunjuk tempat tertentu.³¹

Kondisi ini semakin kokoh dengan adanya pengelompokkan hunian (pemukiman) berdasarkan kelompok etnik tertentu, termasuk di Palembang dijumpai kampung-kampung dalam kategorisasi tersebut. Seperti: Kampung Cina, Kampung Arab, Kampung Jawa, Kampung Bugis dan Kampung etnik lainnya, yang mencerminkan pemisahan secara fisik.³² Mereka tetap saja digolongkan sebagai orang asing hingga masa kemerdekaan RI. Dengan adanya pengelompokkan hunian berdasarkan pengelompokkan etnik yang oleh pemerintah kolonial Belanda dapat dipahami bahwa secara tidak langsung hal tersebut dapat menghambat proses integrasi budaya karena aktivitas bergaul dalam kehidupan keseharian mereka hanya terkungkung diseputaran kampung-kampung mereka itu sendiri.³³

Penggolongan ini dikarenakan masalah identitas mereka yang berbeda dengan masyarakat pribumi. Dikotomi pribumi dan non-pribumi yang semakin dipermasalahan di tengah masyarakat menjadi dilema bagi Negara Indonesia yang multietnis. Hal itu tidak mengherankan bahwa permasalahan pribumi menjadi relatif rumit karena hal ini disebabkan oleh perbedaan fisik dan karakteristik.³⁴ Adanya perbedaan tersebut rentan terhadap terciptanya ketidak harmonisan kondisi kehidupan di lingkungan masyarakat dan sering menimbulkan konflik di daerah serta dapat meluas menjadi konflik nasional.

Untuk mengatasi ketegangan itu maka pada tahun 1967 Pemerintah mengeluarkan kebijakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 240 Tahun 1967 Tentang Kebijaksanaan Pokok yang Menyangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing pada Pasal 3 berbunyi: *"Pembinaan warga Negara keturunan asing didjalankan dengan melalui proses asimilasi terutama untuk mentjegah terdjadinya kehidupan eksklusif rasial"*.

Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya persepektif negatif yang hadir

³¹ Algadri, "Islam Dan Keturunan Arab Di Indonesia. Mizan."

³² Ericka Nurul Syahfitri, "The Economic Activities of the Chinese Ethnic Groups in Palembang During the Colonial Period 1821-1942," *Jurnal Ilmu Sejarah* 5, no. 1 (2020).

³³ A Azra, "Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII. Kencana," 2002.

³⁴ Sari Elsyie Priyanti, "Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Keterangan Waris," *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 226-247, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art12>

di tengah-tengah masyarakat. Adanya dikotomi pribumi dan non-pribumi yang ditujukan pada salah satu etnis atau warga Negara yang berkembang di tengah masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi keutuhan Negara.

Berdasarkan uraian di atas, hambatan integrasi budaya melalui praktik endogami tidak dapat dilepaskan dari akar historis-politis yang membentuk struktur sosial masyarakat keturunan Arab sejak era kolonial. Secara historis, kebijakan pemisahan etnis melalui sistem *Wijkertelsel*³⁵ dan *Passenstelse*³⁶ yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda secara deliberatif mengisolasi komunitas keturunan Arab ke dalam kantong-kantong pemukiman khusus (seperti Perkampungan Al-Munawar di Palembang). Segregasi spasial yang dipaksakan oleh negara tersebut pada gilirannya melembagakan eksklusivisme sosial, di mana interaksi antar-etnis dibatasi secara ketat di ranah publik dan domestik. Dalam situasi keterasingan geopolitik tersebut, tradisi endogami bertransformasi dari sekadar norma lokal menjadi instrumen konsolidasi internal dan strategi bertahan hidup (*survival strategy*) guna menjaga keutuhan identitas, keamanan, serta aset ekonomi kelompok dari tekanan otoritas luar.

Implikasi politik-kultural dari warisan historis ini terus bereproduksi hingga era pasca-kolonial dan menjadi faktor penghambat utama integrasi yang sistemik. Institusionalisasi endogami yang terkonstruksi secara historis menciptakan memori kolektif akan pentingnya benteng kekerabatan yang impermiabel. Ketika pembatasan administratif kolonial telah dihapuskan dan keterbukaan di ruang publik (bahasa, politik, dan ekonomi) terjadi, doktrin politik identitas privat ini tetap mengakar kuat. Endogami dipelihara sebagai mekanisme proteksi diri (*protective shield*) terhadap erosi kultural, yang menyebabkan komunitas ini tetap enggan membuka saluran asimilasi biologis melalui eksogami. Latar belakang historis-politis ini membuktikan bahwa eksklusivisme perkawinan bukan sekadar masalah dogma agama atau konservatisme budaya semata, melainkan merupakan produk konstruksi politik masa lalu yang terus membatasi terbentuknya integrasi struktural-kekerabatan dengan

³⁵ *Wijkertelsel* adalah kebijakan pemukiman kolonial Hindia Belanda yang mewajibkan kelompok Timur Asing (terutama Tionghoa), tetapi di beberapa daerah juga mencakup Arab—untuk tinggal di kawasan atau kampung tertentu yang telah ditetapkan pemerintah kolonial. Kebijakan ini bertujuan memudahkan pengawasan administratif sekaligus membatasi interaksi antara kelompok etnis dengan masyarakat pribumi

³⁶ *Passenstelsel* adalah sistem surat jalan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bagi golongan Timur Asing dan penduduk pribumi di wilayah tertentu. Melalui sistem ini, seseorang diwajibkan membawa surat izin (pas) apabila hendak bepergian ke luar wilayah tempat tinggalnya. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi mobilitas penduduk serta menjaga keamanan dan ketertiban menurut perspektif pemerintah kolonial.

masyarakat lokal hingga saat ini.

2. Dimensi Sosial-Budaya: Endogami dan Benteng Pertahanan Identitas Internal

Praktik perkawinan endogami dilakukan berdasarkan kesamaan identitas, baik itu etnik, suku, agama maupun status sosial ekonomi.³⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dapat dinafikan bahwa manusia cenderung lebih tertarik dan merasa aman dan nyaman jika memilih atau mendapat pasangan hidup karena kesamaan identitas. Penikahan endogami dari sudut pandang sosiologis bersifat manusiawi, namun dengan syarat tidak menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti tingginya perasaan etnisitas, etnosentris dan memicu kesenjangan stratifikasi sosial. Intinya, endogami merupakan bagian dari suatu adat maupun tradisi yang telah disepakati bersama ketika suatu kelompok masyarakat hidup dalam suatu komunitas tertentu yang terikat dengan aturan ataupun norma tradisi atau adat yang ada.

Praktik endogami pada masyarakat keturunan Arab di Palembang tidak hanya dipahami sebagai pola pemilihan pasangan hidup, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif antropologi, suatu kebiasaan yang terus dipraktikkan, diterima oleh anggota komunitas, serta diwariskan kepada generasi berikutnya akan berkembang menjadi adat. Menurut Bronislaw Malinowski, adat merupakan pola perilaku yang secara tradisional disesuaikan dan diterima sebagai pedoman bagi anggota suatu komunitas.³⁸ Dengan demikian, praktik endogami dalam komunitas Arab tidak lagi dipandang sebagai pilihan individual, melainkan telah menjadi norma sosial yang mengatur kehidupan kelompok.

Sebagai suatu adat, praktik endogami memperoleh kekuatan mengikat karena berfungsi menjaga keteraturan sosial di dalam komunitas. Kepatuhan terhadap adat menjadi bagian penting dalam mempertahankan nilai-nilai yang dianggap fundamental oleh kelompok, sedangkan pelanggaran terhadap norma tersebut dapat diikuti oleh sanksi sosial sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan dan

³⁷ Izzatul Ulya, Nabeli Naily, And Abdul Haris Fitri Anto, "Pernikahan Endogami Dikalangan Pesantren Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren Di Tuban)," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, No. 1 (2025): 116–26, <https://doi.org/10.15575/As.V6i1.42563>.

³⁸ Malinowski, Bronislaw. *Crime and Custom in Savage Society*. London: Routledge & Kegan Paul, 1926.

keberlangsungan kehidupan komunitas.³⁹ Dalam masyarakat Arab Palembang, norma tersebut diwujudkan melalui keharusan menjaga kesinambungan nasab (*ahl al-bayt*) dengan membatasi perkawinan, terutama bagi perempuan Syarifah, kepada laki-laki yang berasal dari garis keturunan yang dianggap sepadan.

Dalam konteks ini, endogami mengalami proses pelembagaan sebagai bagian dari budaya komunitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Dedi Sumanto,⁴⁰ hukum adat berkembang dari kebiasaan yang terus dipraktikkan hingga diterima sebagai aturan yang mengikat kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, praktik endogami pada masyarakat Arab di Palembang tidak hanya mencerminkan tradisi perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan identitas genealogis, nilai-nilai keagamaan, serta solidaritas internal komunitas. Dengan kata lain, endogami menjadi benteng pertahanan identitas internal yang menjaga kesinambungan struktur sosial masyarakat Arab di tengah proses interaksi dengan masyarakat Melayu Palembang.

Dari uraian di atas, Parsons⁴¹ menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Adanya individu sebagai aktor.
- b. Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu.
- c. Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai tujuannya.
- d. Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh individu misalnya kelamin dan tradisi.
- e. Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma, dan berbagai ide abstrak yang memengaruhinya dalam memilih dan menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan, misalnya kendala kebudayaan.

Pada konteks teori Talcott Parsons, tindakan sosial tidak pernah dilakukan secara bebas sepenuhnya, melainkan selalu dipengaruhi oleh tujuan, kondisi situasional, serta sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Aktor

³⁹ M. Taufan B., *Pemberdayaan Hukum Adat dalam Penanggulangan Konflik Keluarga* (Surabaya: Global Aksara Pers, 2023)

⁴⁰ Dedi Sumanto, "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181–191, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>

⁴¹ Talcott Parsons. *The Social System*. New York: The Free Press, 1951.

memang memiliki alternatif tindakan untuk mencapai tujuannya, tetapi pilihan tersebut dibatasi oleh struktur sosial dan kebudayaan yang menjadi pedoman dalam kehidupan bersama.⁴² Dalam konteks masyarakat Arab di Palembang, praktik endogami dapat dipahami sebagai tindakan sosial yang berlangsung di bawah pengaruh sistem nilai yang telah mengakar di dalam komunitas. Meskipun individu pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan pasangan hidup, pilihan tersebut dibatasi oleh norma yang mengharuskan perkawinan tetap berada dalam lingkup keturunan yang dianggap sepadan. Pada akhirnya, keputusan untuk melakukan perkawinan endogami tidak semata-mata merupakan pilihan individual, tetapi juga merupakan bentuk penyesuaian terhadap nilai, tradisi, dan struktur sosial yang telah diwariskan antar generasi.

Proses pemilihan pasangan tersebut sejalan dengan pandangan Lamanna dan Riedmann⁴³ yang menjelaskan bahwa keputusan seseorang dalam memilih pasangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain latar belakang keluarga, kelas sosial, status, agama, pengalaman sejarah, serta tekanan sosial yang berkembang di lingkungan tempat individu tersebut hidup. Dalam masyarakat Arab Palembang, faktor-faktor tersebut tampak pada kuatnya pengaruh identitas genealogis, status sosial, serta nilai-nilai keagamaan yang diwariskan dalam keluarga. Oleh karena itu, praktik endogami tidak hanya dipandang sebagai pilihan perkawinan, tetapi juga sebagai strategi mempertahankan kesinambungan nasab, identitas kelompok, dan jaringan kekerabatan.

Norma yang mengatur praktik endogami tersebut kemudian memperoleh legitimasi melalui proses sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Margaret M. Poloma⁴⁴ menjelaskan bahwa norma sosial berfungsi mengarahkan sekaligus mengendalikan perilaku individu agar sesuai dengan nilai yang diterima oleh masyarakat. Kepatuhan terhadap norma dipertahankan melalui mekanisme sanksi sosial terhadap individu yang melakukan penyimpangan. Dalam komunitas Arab Palembang, kondisi tersebut tercermin pada kuatnya tekanan sosial terhadap perempuan Syarifah yang menikah dengan laki-laki non-Sayid. Pelanggaran terhadap

⁴² Talcott Parsons. 1951.

⁴³ Lamanna, Mary Ann, and Agnes Riedmann. *Marriages & Families: Making Choices in a Diverse Society*. 10th ed. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009.

⁴⁴ Margaret Paloma, "Reconsidering the Dual-Career Marriage: A Longitudinal Approach," *Journal of Family Issues* 2, no. 2 (1981): 205–224, <https://doi.org/10.1177/0192513X8100200206>

norma endogami tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap tradisi keluarga, tetapi juga sebagai penyimpangan terhadap identitas genealogis komunitas, sehingga dalam beberapa kasus dapat menimbulkan sanksi sosial berupa pengucilan atau tidak diakuinya hubungan nasab.

Dengan demikian, praktik endogami pada masyarakat Arab Palembang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai keputusan personal dalam memilih pasangan hidup. Praktik tersebut merupakan hasil interaksi antara pilihan individu dengan sistem nilai, norma, struktur sosial, dan pengalaman historis yang membentuk sekaligus mempertahankan identitas internal komunitas. Dalam konteks inilah endogami berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga kesinambungan identitas genealogis sekaligus memperkuat batas-batas sosial antara komunitas Arab dan masyarakat di luar kelompoknya.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang membatasi integrasi budaya Arab–Melayu di Palembang adalah aspek sosial-budaya, khususnya praktik perkawinan endogami yang masih dipertahankan dalam komunitas Arab, terutama di kalangan Sayid. Keterbatasan integrasi tersebut terlihat dari tidak berlangsungnya perkawinan antara perempuan Syarifah dengan laki-laki non-Sayid, termasuk masyarakat Melayu Palembang. Akibatnya, institusi perkawinan yang pada umumnya menjadi salah satu media penting dalam proses pembauran antar kelompok tidak berfungsi secara optimal dalam konteks hubungan masyarakat Arab dan Melayu di Palembang.

Praktik endogami tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai dan budaya yang berkembang di dalam komunitas Arab. Akibatnya, institusi perkawinan yang pada umumnya menjadi salah satu media penting dalam proses integrasi antar kelompok tidak berfungsi secara optimal. Namun perlu dipahami bahwa hal tersebut bukan semata-mata karena “eksklusivisme” komunitas Arab. Namun, dalam konteks masyarakat Arab keturunan Ba'Alawi terdapat kecenderungan bahwa praktik tersebut berkaitan dengan upaya mempertahankan kesinambungan nasab (*ahl al-bayt*) sebagai identitas genealogis yang memiliki nilai religius dan sosial. Oleh karena itu, endogami tidak hanya dipahami sebagai pilihan pribadi dalam perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme kolektif untuk menjaga identitas kelompok dan keberlanjutan garis keturunan.

Sebagai konsekuensi dari kuatnya norma tersebut, pelanggaran terhadap praktik endogami, khususnya apabila perempuan Syarifah menikah dengan laki-laki non-Sayid, dalam beberapa kasus dapat memunculkan sanksi sosial di lingkungan komunitas, seperti pengucilan atau tidak diakuinya hubungan genealogis dalam silsilah keluarga. Sanksi tersebut menunjukkan bahwa praktik endogami tidak lagi dipahami sekadar sebagai tradisi perkawinan, melainkan telah menjadi bagian dari sistem norma sosial yang mengatur kehidupan komunitas Arab di Palembang.

Berikut hasil wawancara dengan Ahmad Ghasim Syahab (2025) mengenai hal tersebut:

.....jika terjadi pernikahan antar Syarifah (sebutan untuk wanita Arab) dengan laki-laki non-Arab, maka perempuan tersebut akan mendapat sanksi, yaitu pernikahan tidak akan dilakukan di tempat mempelai yang berasal dari Arab, keluarga tidak menghadiri pernikahan tersebut hanya perwakilan untuk walinya saja yang datang, dikucilkan dari keluarga, tidak diundang ketika pada saat acara-acara keluarga bahkan ada yang dikeluarkan dari silsilah keluarga dan tidak memperoleh warisan”.

Hal senada dikemukakan oleh Bapak Idrus Al-Kaf dan Muhammad Naoupal akademisi keturunan Arab, 2025) yang mengemukakan bahwa:

“apabila terjadi pernikahan antara wanita Arab dengan seorang laki-laki yang bukan berasal dari keturunan Arab, maka pernikahan dilangsungkan di rumah laki-laki tidak boleh di rumah mempelai perempuan dan selanjutnya keluarga dari pihak perempuan tidak menghadiri acara tersebut hanya utusan untuk perwalian saja yang datang. Saksi selanjutnya dikucilkan dari keluarga dan saat ada acara keluarga mereka tidak diundang. Selain itu sanksi selanjutnya dikeluarkan dari silsilah keluarga bahkan tidak mendapatkan warisan.”

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, dapat dipahami bahwa praktik perkawinan antara perempuan Syarifah dan laki-laki non-Sayid atau non-Arab masih memperoleh respons berupa sanksi sosial yang kuat di sebagian komunitas Arab Palembang. Bentuk sanksi yang diungkapkan para informan meliputi tidak dilibatkannya keluarga dalam prosesi perkawinan, pengucilan dari lingkungan keluarga, tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan keluarga, serta dalam beberapa kasus tidak lagi dicantumkan dalam silsilah keluarga dan tidak memperoleh hak waris. Selain berdampak pada hubungan sosial, sanksi tersebut juga berpotensi menimbulkan konsekuensi psikologis bagi perempuan yang bersangkutan, seperti munculnya rasa bersalah, tekanan batin, atau perasaan terasing akibat tidak lagi memperoleh

pengakuan dan dukungan dari keluarga maupun komunitasnya.

Dengan demikian, praktik perkawinan endogami yang disertai dengan pemberian sanksi sosial tersebut menunjukkan bahwa perkawinan dalam komunitas Arab di Palembang tidak hanya dipahami sebagai urusan pribadi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mempertahankan identitas dan batas-batas sosial komunitas. Keberadaan sanksi terhadap perempuan Syarifah yang menikah dengan laki-laki non-Arab memperlihatkan adanya upaya kolektif untuk menjaga kesinambungan nasab serta mempertahankan norma yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, hubungan kekerabatan dengan masyarakat di luar komunitas menjadi lebih terbatas karena institusi pernikahan, yang pada umumnya menjadi salah satu media integrasi antar kelompok, tidak berlangsung secara terbuka dan menjadi terhambat. Akibatnya, interaksi antara masyarakat Arab dan Melayu lebih banyak berkembang pada ranah sosial, ekonomi, dan keagamaan di ruang publik, sedangkan pada ranah kekerabatan masih terdapat batas-batas sosial yang dipertahankan oleh komunitas Arab melalui praktik perkawinan endogami.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik endogami pada masyarakat keturunan Arab di Palembang bukanlah tradisi yang lahir sebagai respons terhadap masyarakat Melayu Palembang, melainkan telah menjadi bagian dari sistem sosial komunitas Ba'Alawi sejak di Hadramaut sebagai upaya mempertahankan kemurnian nasab (*ahl al-bayt*). Akan tetapi, praktik tersebut mengalami proses penguatan melalui dinamika sejarah yang berlangsung sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga pemerintahan kolonial Belanda. Dengan demikian, praktik perkawinan endogami tidak hanya dipertahankan karena alasan genealogis dan keagamaan, tetapi juga memperoleh legitimasi politik, sosial, dan budaya yang semakin memperkuat keberlangsungannya.

Dari perspektif historis-politis, kedudukan masyarakat Arab yang memperoleh posisi istimewa di lingkungan Kesultanan Palembang Darussalam menjadi salah satu faktor yang memperkuat praktik perkawinan endogami. Status tersebut dibangun melalui peran mereka dalam perdagangan, penyebaran Islam, serta legitimasi religius sebagai keturunan Nabi Muhammad. Kondisi ini menempatkan masyarakat Arab,

khususnya golongan Sayid, berada pada strata sosial yang tinggi sehingga hubungan perkawinan lebih diarahkan kepada kalangan elite atau bangsawan Melayu sebagai bagian dari upaya mempertahankan *prestise* sosial dan memperluas jaringan kekuasaan.

Setelah Kesultanan Palembang runtuh dan pemerintahan kolonial mengambil alih kekuasaan, orientasi perkawinan sempat mengalami perubahan. Kebijakan kolonial yang menerapkan klasifikasi penduduk, segregasi sosial melalui *Wijkenstelsel* dan *Passenstelsel*, serta pengelompokan permukiman berdasarkan etnis justru semakin memperkuat eksklusivitas komunitas Arab. Dalam kondisi tersebut, pilihan pasangan hidup semakin diarahkan kepada sesama komunitas Sayid, bahkan menjangkau jaringan keluarga Sayid di Singapura yang memiliki kedudukan ekonomi dan sosial yang tinggi. Meskipun masih terdapat perkawinan dengan kalangan priyayi Melayu, praktik tersebut semakin terbatas dan umumnya hanya terjadi pada keluarga Sayid yang kurang terkemuka.

Sementara itu, dari perspektif sosial budaya, keterbatasan integrasi budaya Arab–Melayu terutama disebabkan oleh tetap dipertahankannya praktik perkawinan endogami sebagai norma budaya komunitas. Larangan perempuan Syarifah menikah dengan laki-laki non-Sayid menyebabkan institusi pernikahan tidak menjadi media pembauran antara masyarakat Arab dan Melayu sebagaimana lazim terjadi dalam proses akulturasi budaya. Dalam konteks ini, endogami tidak lagi sekadar dipahami sebagai aturan keagamaan, melainkan telah berkembang menjadi adat yang diwariskan antar generasi. Sebagai suatu kebiasaan yang telah mengalami pelembagaan, praktik tersebut dipatuhi sebagai bagian dari norma sosial yang mengatur kehidupan komunitas, sehingga pelestarian nasab dipandang sebagai kewajiban kolektif yang harus dipertahankan.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji praktik endogami dari perspektif yang berbeda, misalnya sebagai mekanisme pembentukan dan pelestarian identitas sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Arab-Hadrami. Kajian semacam ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi endogami, tidak hanya sebagai faktor yang membatasi integrasi budaya, tetapi juga sebagai strategi komunitas dalam mempertahankan identitas, nilai, dan kesinambungan tradisi yang diwariskan antar generasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, Mochammad Sayyid, Abbas Arfan, Fadil SJ, dan Ramlan. "Pernikahan Endogami Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural." *Mu'asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.29300/mua.v4i2.10168>.
- Algadri, Hamid. *Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 1999.
- . *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*. Edisi ke-2. Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.
- Apriana, Apriana. "Asimilasi Kultural Arab-Melayu Palembang." *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 199–214. <https://doi.org/10.19109/Medinate.v15i2.4248>.
- Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-Akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1994.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. 2nd ed. New York: Alfred A. Knopf, 1969.
- Jumhari. "Akulturasi Budaya Arab, Cina, dan Lokal di Palembang." *Jurnal Siddhayatra* 23, no. 2 (2018): 110–125.
- Kurdi, Sulaiman. "Transnasional Islamic Movement (Studi Gerakan Islam Hizbut Tahrir Indonesia)." *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2013): 227–244.
- Lamanna, Mary Ann, and Agnes Riedmann. *Marriages & Families: Making Choices in a Diverse Society*. 10th ed. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning, 2009.
- Malinowski, Bronislaw. *Crime and Custom in Savage Society*. London: Routledge & Kegan Paul, 1926.
- Mawardi, A., et al. "Arsitektur Eklektik Rumah Komunitas Arab di Kampung Al-Munawar Palembang." *Jurnal Langkau Betang* 7, no. 2 (2020): 89–102.
- Maryamah, Nurhusna, Azzahrah Ramaputri Tilotama, dan Melisa Putri Utami. "Kampung Arab Al-Munawar sebagai Salah Satu Destinasi Sejarah Melayu di Palembang." *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah* 10, no. 1 (2024): 30–36.
- Nur Ali, R. A., et al. "Permukiman Al-Munawar 13 Ulu Palembang: Kajian Arkeologi Ruang Permukiman Etnis Arab." *Siddhayatra: Jurnal Arkeologi* 24, no. 1 (2019): 15–30.

- Paloma, Margaret. "Reconsidering the Dual-Career Marriage: A Longitudinal Approach." *Journal of Family Issues* 2, no. 2 (1981): 205–224. <https://doi.org/10.1177/0192513X8100200206>.
- Parsons, Talcott. *The Social System*. New York: The Free Press, 1951.
- Peeters, Jeroen. *Kaum Tuo–Kaum Mudo: Perubahan Religius di Palembang 1821–1942*. Jakarta: INIS, 1997.
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto, eds. *Sejarah Nasional Indonesia III: Zaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Priyanti, Sari Elsy. "Tinjauan Yuridis Penggolongan Penduduk dalam Pembuatan Keterangan Waris." *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 226–247. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art12>.
- Roff, W. R. *The Origins of Malay Nationalism*. New Haven: Yale University Press, 1967.
- Rustamana. "Metode Historis sebagai Pedoman dalam Penelitian Sejarah." *Cendekia Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 50–54. <https://doi.org/10.9644/Sindoro.V4i5.3317>.
- Sholeh, Kabib. "Nilai-Nilai Sejarah dan Budaya Kampung Arab Al-Munawar sebagai Kawasan Cagar Budaya Kota Palembang." In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan IPS*, vol. 1, 23–24. Palembang, 2022.
- Sunata, and C. Murod. "Adaptasi Sosio-Kultural Komunitas Arab di Kota Palembang." *Jurnal Sejarah dan Budaya* 15, no. 1 (2021): 45–58.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 181–191. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.
- Syahfitri, Ericka Nurul. "The Economic Activities of the Chinese Ethnic Groups in Palembang During the Colonial Period 1821–1942." *Jurnal Ilmu Sejarah* 5, no. 1 (2020).
- Ulya, Izzatul, Nabiela Naili, and Abdul Haris Fitri Anto. "Pernikahan Endogami Dikalangan Pesantren dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pondok Pesantren di Tuban)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6, no. 1 (2025): 116–126. <https://doi.org/10.15575/AS.V6i1.42563>.
- van den Berg, L. W. C. *Orang Arab di Nusantara*. Translated by Rahayu Hidayat. Depok: Komunitas Bambu, 2010.